

**EVALUASI BORDER CONTROL MANAGEMENT PLBN SKOUW DALAM
MENEGAKKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN KEAMANAN KEIMIGRASIAN**

*(Evaluation of Border Control Management at PLBN Skouw in Upholding
Immigration Supervision and Security Functions)*

¹Ledyana Hanna Basna, ²Virra Wirdhiningsih, ³Wisnu Widayat

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Keimigrasian,
Politeknik Pengayoman Indonesia

¹hannaledyana09@gmail.com,

²nathifamr@gmail.com, ³widayatwisnu66@gmail.com

ABSTRACT

The Border Crossings of Indonesia (PLBN) Skouw is one of the main gateways of Indonesia that shares a direct border with Papua New Guinea. To uphold the functions of supervision and maintain national security, the Directorate General of Immigration implements the Border Control Management (BCM) system as the primary instrument in immigration checks. This study aims to evaluate the effectiveness of BCM usage at PLBN Skouw in the context of immigration functions, namely the supervision of foreigners and guarding against cross-border threats. The method used is qualitative descriptive with a documentary study approach and regulatory analysis, supported by secondary data from relevant agency reports. The research results show that the BCM system has supported the efficiency of the inspection and monitoring process of border crossers through the integration of biometric data and facial recognition systems. However, challenges were found in network infrastructure, human resource readiness, as well as the use of unofficial routes by local communities. Therefore, it is necessary to enhance technical capacity, socialize with border communities, and strengthen inter-agency synergy in order to optimize the function of BCM as the main instrument for monitoring and protecting national sovereignty.

*Keywords: border control management, PLBN skouw, immigration, oversight,
border security*

ABSTRAK

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw merupakan salah satu gerbang utama Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Untuk menegakkan fungsi pengawasan dan menjaga keamanan negara, Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan sistem *Border Control Management* (BCM) sebagai instrumen utama dalam pemeriksaan keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan BCM di PLBN Skouw dalam konteks fungsi keimigrasian, yakni pengawasan orang asing dan penjagaan terhadap ancaman lintas batas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis regulasi, didukung data sekunder dari laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem BCM telah menunjang efisiensi proses pemeriksaan dan pemantauan pelintas batas melalui integrasi data biometrik dan sistem pengenalan wajah. Namun, ditemukan tantangan dalam infrastruktur jaringan, kesiapan sumber daya manusia, serta penggunaan jalur tidak resmi oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis, sosialisasi kepada masyarakat perbatasan, serta penguatan sinergi antarinstansi dalam rangka mengoptimalkan fungsi BCM sebagai instrumen utama pengawasan dan perlindungan kedaulatan negara.

Kata Kunci: *border control management*, PLBN skouw, keimigrasian, pengawasan, keamanan perbatasan

A. Pendahuluan

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Jayapura memegang peranan penting sebagai pintu gerbang darat strategis yang menghubungkan Indonesia dan Papua Nugini. Lokasinya yang krusial menjadikan PLBN ini garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem *Border Control*

Management (BCM) diimplementasikan secara komprehensif guna memperketat pengawasan terhadap perlintasan orang dan barang (Imbiri et al., 2022). Sistem BCM ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup prosedur CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*) yang terintegrasi, serta memadukan teknologi biometrik dan

operasi intelijen yang canggih. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan deteksi terhadap pelintas ilegal dan mengidentifikasi aktivitas kriminal transnasional, seperti penyelundupan narkoba, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan negara.

Pentingnya pengawasan berbasis sistem di perbatasan semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya ancaman lintas negara, baik dari aspek ilegalitas perlintasan maupun kejahatan lintas batas. Dalam konteks tersebut, sistem BCM menjadi instrumen utama dalam memperkuat pelaksanaan fungsi keimigrasian di titik perbatasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nugroho dan Fitri (2020), sistem pengawasan modern tidak lagi dapat hanya mengandalkan pemeriksaan manual, melainkan harus berbasis pada sistem digital yang memungkinkan integrasi data dan pertukaran informasi antarlembaga. Teknologi biometrik dan face recognition yang digunakan dalam sistem BCM telah membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan pemeriksaan pelintas batas di berbagai PLBN.

Secara khusus mengidentifikasi tiga peran utama PLBN Skouw, yaitu sebagai regulator yang mengatur perlintasan, supervisor yang mengawasi kepatuhan, dan *border mobility centre* yang memfasilitasi pergerakan. Meskipun demikian, studi ini juga menyoroti bahwa pengawasan pada jalur-jalur informal masih memiliki banyak kelemahan, menunjukkan adanya tantangan persisten dalam mencapai pengawasan yang menyeluruh. Karakteristik geografis dan sosial masyarakat lokal di Skouw, yang seringkali berburu peluang ekonomi melalui jalur-jalur informal, menunjukkan bahwa temuan serupa diperkirakan juga berlaku di PLBN Skouw. Keterbatasan infrastruktur TI di Skouw dapat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi BCM berbasis teknologi.

Dalam kerangka teori manajemen perbatasan modern, pendekatan pengawasan tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal, pembangunan wilayah, serta interkoneksi ekonomi (Anderson & O'Dowd, 1999). Oleh sebab itu,

manajemen perbatasan idealnya bersifat multidimensi, tidak hanya menekankan pada keamanan negara semata. Dalam kasus PLBN Skouw, pendekatan ini relevan mengingat wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki mobilitas tinggi dan ikatan sosial lintas negara. Oleh karena itu, keberhasilan sistem BCM di PLBN Skouw sangat bergantung pada bagaimana sistem ini diterima dan diadopsi oleh masyarakat lokal.

Dukungan kelembagaan yang kuat juga menjadi kunci utama dalam optimalisasi fungsi BCM. Seperti diungkapkan oleh Handayani dan Subagyo (2018), kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam sistem CIQS menjadi penentu keberhasilan sistem pengawasan berbasis teknologi. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses pemeriksaan di PLBN akan berjalan secara sektoral dan tidak saling terintegrasi. Dalam konteks PLBN Skouw, peran imigrasi harus bersinergi dengan bea cukai, karantina, dan aparat keamanan lainnya dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif.

Modernisasi infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi prasyarat mutlak untuk menunjang keberhasilan BCM. Seperti yang ditegaskan oleh Widiatmoko (2021), keberhasilan transformasi digital dalam layanan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan petugas lapangan. Di PLBN Skouw, masih terdapat tantangan terkait pelatihan teknis dan adaptasi petugas terhadap perangkat digital yang digunakan dalam sistem BCM. Selain itu, ketersediaan jaringan internet yang stabil menjadi syarat penting agar sistem dapat berjalan secara real-time dan tidak terhambat secara teknis.

Dari pemahaman tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan BCM di PLBN Skouw menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi ini difokuskan pada sejauh mana penggunaan BCM telah efektif dalam menegakkan fungsi keimigrasian, khususnya dalam hal pengawasan dokumen, identifikasi pelintas, dan penanganan pelanggaran keimigrasian. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan guna mendapatkan pemahaman yang

mendalam mengenai efektivitas sistem, tantangan implementasi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan.

Dengan mempertimbangkan konteks geografis, sosial, kelembagaan, dan teknologi di PLBN Skouw, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan pengawasan perbatasan yang lebih efektif dan manusiawi. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait dalam mengembangkan strategi pengawasan keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan lapangan dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi global.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Border Control Management (BCM)

Border Control Management (BCM) merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pergerakan orang melintasi perbatasan negara. Sistem ini sangat penting dalam konteks globalisasi dan mobilitas internasional, karena

menjadi garis pertahanan pertama dalam menjaga keamanan nasional. Menurut Nugroho dan Fitri (2020), implementasi BCM tidak hanya melibatkan pemeriksaan administratif, tetapi juga integrasi sistem informasi dan keamanan, seperti teknologi biometrik, data paspor elektronik, serta basis data intelijen. Oleh karena itu, BCM memainkan peran sentral dalam deteksi dini terhadap ancaman lintas batas seperti terorisme, perdagangan manusia, serta penyelundupan narkoba.

BCM juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang kuat dan berkolaborasi secara lintas sektoral. Dalam konteks Indonesia, terutama di wilayah perbatasan seperti PLBN Skouw, BCM diterapkan melalui pendekatan CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*) yang saling berkoordinasi untuk memastikan pengawasan menyeluruh. Ditjen Imigrasi (2024) menyebut bahwa implementasi BCM modern juga mengacu pada prinsip e-Governance, dengan penekanan pada kecepatan layanan, akurasi data, dan transparansi operasional. Tanpa koordinasi yang baik

antarinstansi dan infrastruktur teknologi yang memadai, efektivitas BCM akan sulit tercapai.

2.2 Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan

Fungsi keimigrasian merupakan salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban negara, khususnya di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan rentan terhadap pelanggaran hukum dan aktivitas lintas negara ilegal yang dapat mengancam stabilitas nasional. Gunawan (2019) menekankan bahwa aparat imigrasi di perbatasan tidak hanya menjalankan pemeriksaan dokumen, tetapi juga bertugas melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran seperti masuknya WNA tanpa izin, perdagangan manusia, atau ancaman radikalisme. Oleh sebab itu, keimigrasian harus mengembangkan kapasitasnya dalam pengumpulan dan analisis data pelintas secara real-time.

Dalam konteks perbatasan Indonesia–Papua Nugini, seperti PLBN Skouw, fungsi keimigrasian menjadi sangat kompleks karena adanya lintas budaya dan sosial

antara masyarakat kedua negara. Aktivitas lintas batas sering dilakukan masyarakat lokal bukan karena niat pelanggaran hukum, tetapi karena keterikatan ekonomi dan kekerabatan. Hal ini menambah beban aparat keimigrasian dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan pemahaman sosial budaya. Dengan demikian, peran keimigrasian tidak hanya administratif, tetapi juga melibatkan pemahaman antropologis dan kerja sama lintas sektor.

2.3 Penggunaan Teknologi Biometrik dan Pengenalan Wajah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian. Teknologi biometrik dan pengenalan wajah (*face recognition*) menjadi bagian penting dalam modernisasi BCM karena mampu meningkatkan akurasi verifikasi identitas pelintas batas. Menurut Setiawan et al. (2021), penggunaan biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah dapat meminimalisir pemalsuan identitas, mendeteksi pelintas yang memiliki catatan pelanggaran, serta mempercepat proses pemeriksaan. Ini

sangat penting di titik perlintasan dengan volume mobilitas tinggi, seperti PLBN Skouw.

Meski demikian, efektivitas teknologi ini sangat tergantung pada infrastruktur yang mendukung. Tanpa jaringan internet yang stabil, sistem pengenalan wajah tidak dapat dioperasikan secara optimal. Selain itu, kapasitas petugas juga memegang peranan penting dalam mengoperasikan teknologi canggih tersebut. Pelatihan berkala dan penyempurnaan sistem database menjadi prasyarat agar pemanfaatan teknologi ini bisa berfungsi secara maksimal dalam menunjang tugas keimigrasian di perbatasan.

2.4 Tantangan Pelaksanaan BCM di PLBN

Penerapan BCM di wilayah perbatasan seperti PLBN Skouw tidak lepas dari berbagai kendala struktural dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur, terutama akses jaringan internet dan perangkat keras yang mendukung sistem pengawasan berbasis digital. Teturan et al. (2019) menyoroti bahwa ketimpangan infrastruktur antara pusat dan wilayah

perbatasan sering menjadi penghambat utama dalam optimalisasi fungsi pengawasan. Tanpa konektivitas yang andal, sistem BCM tidak dapat bekerja secara *real-time*, sehingga menurunkan efektivitas pemantauan dan respon terhadap pelintas ilegal.

Tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua petugas di lapangan memiliki kapasitas teknis untuk mengoperasikan sistem berbasis teknologi tinggi. Pelatihan yang terbatas, beban kerja yang tinggi, dan keterbatasan personel menjadi isu krusial. Di samping itu, kebiasaan masyarakat lokal yang masih menggunakan jalur-jalur informal karena faktor ekonomi dan budaya juga menjadi tantangan tersendiri. Sihombing (2020) menyatakan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan pendekatan sosial-budaya agar tidak menciptakan resistensi di masyarakat perbatasan.

2.5 Kolaborasi CIQS dan Sinergi Antarinstansi

Keberhasilan Sistem BCM di perbatasan tidak hanya bergantung

pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam CIQS. Sistem CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*) adalah kerangka kerja terpadu yang bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan terhadap orang dan barang di pintu perbatasan. Menurut Handayani dan Subagyo (2018), kolaborasi efektif antarinstansi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan, menghindari duplikasi tugas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Di PLBN Skouw, kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi rutin dan penggunaan aplikasi digital terpadu.

Namun, kolaborasi ini masih menghadapi kendala struktural dan fungsional. Perbedaan SOP antarinstansi, ketimpangan kewenangan, dan keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi masih menjadi penghambat. Selain itu, ketiadaan pusat data bersama yang mampu menyimpan dan menganalisis informasi pelintas secara komprehensif juga membuat koordinasi seringkali lamban. Untuk itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang mendorong interoperabilitas

sistem dan mekanisme pertukaran data secara real-time agar pengawasan di PLBN berjalan efektif dan efisien.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai landasan utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data kuantitatif atau statistik, melainkan pada penelusuran mendalam terhadap makna, konteks, dan pemahaman konseptual atas implementasi sistem *Border Control Management* (BCM) dalam menegakkan fungsi pengawasan dan keamanan keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendukung argumentasi dan temuan penelitian.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku akademik, laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi

dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dokumen kebijakan, serta artikel berita yang kredibel dan relevan dengan isu pengawasan perbatasan. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan regulasi teknis lainnya juga dijadikan acuan untuk memahami kerangka hukum pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu proses membaca secara kritis setiap sumber pustaka, mengidentifikasi tema-tema kunci, serta mengelompokkan informasi berdasarkan isu-isu yang berkaitan dengan efektivitas implementasi BCM. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan sumber, pencatatan informasi penting, penafsiran makna, hingga penyusunan sintesis yang mengarah pada kesimpulan konseptual. Validitas data dalam studi kepustakaan ini dijaga melalui pemilihan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan secara akademik serta kebijakan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan potensi sistem BCM di PLBN Skouw, serta kontribusinya dalam memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hasil analisis kemudian menjadi dasar dalam memberikan evaluasi kritis sekaligus rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif dan berbasis data.

C. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Pengawasan dan Verifikasi Identitas Keimigrasian

Implementasi Border Control Management (BCM) di PLBN Skouw telah memperkuat fungsi keimigrasian, khususnya dalam proses pengawasan terhadap perlintasan orang antarnegara. Sistem ini membantu memastikan bahwa setiap pelintas, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), diperiksa secara ketat melalui verifikasi identitas berbasis dokumen resmi seperti paspor dan *Traditional Border Card* (TBC). Teknologi biometrik dan sistem

pengenalan wajah (face recognition) yang diterapkan memungkinkan proses identifikasi berlangsung secara digital, efisien, dan minim kesalahan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan modern yang menitikberatkan pada deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan dari luar.

Salah satu kekuatan sistem BCM adalah kemampuannya dalam mendeteksi individu yang mencoba menyalahgunakan identitas atau dokumen keimigrasian. Dengan basis data yang terintegrasi, petugas di PLBN Skouw dapat mengakses informasi pelintas secara real-time, termasuk riwayat perlintasan sebelumnya, status visa, dan catatan pelanggaran. Ketika ditemukan ketidaksesuaian antara data biometrik dan informasi dokumen, sistem akan langsung memberi notifikasi kepada petugas, sehingga langkah pengawasan dapat segera dilakukan. Mekanisme ini menjadikan BCM sebagai alat bantu yang sangat efektif dalam menunjang pengawasan keimigrasian yang lebih cermat dan cepat.

Namun demikian, efektivitas verifikasi identitas ini masih menghadapi beberapa kendala teknis. Gangguan jaringan internet sering kali memperlambat proses pemeriksaan, terlebih pada saat jam sibuk dengan volume pelintas yang tinggi. Selain itu, sistem perangkat lunak BCM masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam kecepatan pemrosesan data biometrik dan integrasi dengan instansi lain. Ketika proses pencocokan data berlangsung lambat, petugas dihadapkan pada risiko antrean panjang dan potensi kesalahan manual, yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan dan pengawasan.

Perlu juga disoroti bahwa keberadaan pelintas yang menggunakan jalur tidak resmi masih menjadi tantangan utama. Masyarakat lokal yang belum memahami pentingnya penggunaan jalur resmi dan prosedur keimigrasian cenderung tetap menggunakan lintasan informal. Dalam kasus seperti ini, meskipun teknologi BCM mampu meningkatkan akurasi pengawasan, efektivitas sistem tetap terbatas jika tidak dibarengi dengan edukasi hukum dan pengawasan fisik di wilayah-wilayah

rawan. Oleh karena itu, integrasi sistem dengan patroli darat dan pendekatan kemasyarakatan menjadi komponen penting dalam memaksimalkan fungsi BCM secara keseluruhan.

4.2 Integrasi Data dan Kolaborasi Lintas Instansi dalam Pengawasan

Sistem pengawasan keimigrasian di PLBN Skouw tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan dalam kerangka kerja sama antarinstansi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security). Dalam pelaksanaan di lapangan, integrasi data antar lembaga menjadi kunci dalam memperkuat proses pengambilan keputusan dan mempercepat respon terhadap situasi di perbatasan. Melalui BCM, pertukaran data pelintas dapat dilakukan secara digital antarunit CIQS, seperti data identitas, jenis dokumen perjalanan, tujuan kedatangan, hingga manifest barang yang dibawa. Sistem ini mendukung sinergi pengawasan yang lebih terpadu dan menyeluruh di PLBN.

Aplikasi *face recognition* yang digunakan oleh Imigrasi juga telah dilengkapi dengan fitur berbagi data

secara real-time kepada lembaga lain seperti Bea Cukai dan Karantina. Hal ini memungkinkan pengecekan lintas fungsi, misalnya untuk mendeteksi barang terlarang yang dibawa oleh pelintas yang telah terindikasi sebagai pelanggar imigrasi. Namun, implementasi integrasi data ini belum berjalan sempurna karena masih terbatasnya keseragaman sistem informasi di masing-masing instansi. Belum semua unit menggunakan platform yang kompatibel dengan sistem BCM, sehingga terjadi kendala dalam sinkronisasi data.

Keterbatasan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang lambat juga memperburuk masalah. PLBN Skouw yang terletak di daerah perbatasan dengan kontur geografis yang menantang sering mengalami gangguan jaringan, yang berdampak pada keterlambatan proses input dan output data. Di sisi lain, belum semua petugas CIQS memiliki pelatihan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem secara optimal. Hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas integrasi data bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.

Untuk itu, penguatan integrasi lintas instansi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembaruan infrastruktur, penyamaan standar operasional, hingga pengembangan pusat data bersama yang memungkinkan akses cepat dan aman bagi semua unit CIQS. Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara menyeluruh, proses pengawasan dapat berlangsung lebih efisien, dan fungsi BCM sebagai alat deteksi ancaman lintas batas dapat berjalan optimal sesuai tujuannya.

D. Kesimpulan

Penggunaan sistem *Border Control Management* (BCM) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw merupakan langkah strategis dalam mendukung fungsi pengawasan dan keamanan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Melalui sistem ini, proses pemeriksaan terhadap pelintas batas menjadi lebih akurat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, terutama karena integrasi teknologi biometrik dan sistem deteksi otomatis. BCM juga terbukti mampu memperkuat fungsi pencegahan terhadap penyalahgunaan dokumen

dan masuknya individu yang berpotensi membahayakan keamanan negara.

Namun, meskipun secara teknis BCM telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek infrastruktur pendukung seperti jaringan komunikasi, pemutakhiran perangkat lunak, dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Selain itu, jalur-jalur perlintasan informal yang masih digunakan oleh masyarakat lokal menjadi salah satu celah keamanan yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh sistem BCM saja.

Dengan demikian, meskipun penerapan BCM di PLBN Skouw telah memberikan kontribusi positif terhadap pengawasan dan keamanan keimigrasian, upaya penguatan dari sisi kelembagaan, teknologi, dan sosial kemasyarakatan tetap sangat diperlukan agar fungsi keimigrasian sebagai penjaga gerbang negara dapat berjalan secara maksimal.

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi :

Pemerintah perlu melakukan modernisasi infrastruktur pendukung BCM, khususnya dalam hal jaringan internet yang stabil dan sistem pendukung lainnya. Hal ini penting agar proses pemeriksaan dokumen dan deteksi biometrik dapat berlangsung secara real time tanpa hambatan teknis.

2. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM:

Petugas imigrasi di PLBN Skouw perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan dalam hal penggunaan BCM, analisis data pelintas, dan deteksi terhadap indikasi pelanggaran keimigrasian. Ini akan meningkatkan responsivitas dan ketelitian dalam pengawasan.

3. Pengawasan Jalur Informal :
Pemerintah perlu memperkuat patroli pada jalur-jalur tidak resmi yang sering dilalui masyarakat lokal dengan tetap mempertimbangkan

pendekatan yang humanis dan berbasis budaya. Hal ini harus dilakukan melalui kolaborasi antara Imigrasi, TNI, dan Polri secara terpadu.

4. Sinergi CIQS dan Kolaborasi Antarinstansi:

Optimalisasi BCM juga harus didukung oleh peningkatan koordinasi antarinstansi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*) agar pengawasan perbatasan dilakukan secara holistik dan menyeluruh, bukan bersifat sektoral.

5. Sosialisasi kepada Masyarakat Perbatasan:

Edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya penggunaan jalur resmi dan tata cara perlintasan sesuai aturan keimigrasian perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu membangun kesadaran hukum serta memperkuat legitimasi

kehadiran negara di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J., & O'Dowd, L. (1999). *Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance*. *Regional Studies*, 33(7), 593–604.
- Antara News. (2025). *Skouw Border Gate: A Vital Link*.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2022). *Rencana Induk PLBN Skouw 2022–2025*.
- BIRCI Journal. Imbiri, A., Hadiwijoyo, S., & Suwartiningsih, D. (2022). *Analysis of the Role of Skouw PLBN*. BIRCI Journal.
- BNPP. (2024). *PLBN Skouw Koordinasi Bersama CIQS*.
- BNPP. (2025). *Sigap Amankan Teripang di Perbatasan*.
- Ditjen Imigrasi. (2024). *Integrated Border Control Management (IBCM)*. <https://imigrasi.go.id>
- Gunawan, A. (2019). *Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 112–124.
- Handayani, S., & Subagyo, A. (2018). *Sinergi CIQS dalam Penanganan Perlintasan Perbatasan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 88–99.
- Handayani, S., & Subagyo, A. (2018). *Sinergi CIQS dalam Penanganan Perlintasan Perbatasan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 88–99.
- Kemenko Polhukam. (2023). *Strategi Penguatan Wilayah Perbatasan Indonesia*. www.polkam.go.id
- Korwa, J.R.V., & Sinaga, M. (2025). *The Role of the Indonesia-PNG Border in Preventing Covid-19 Spread*. *Journal of Political Research*.
- Nugroho, R., & Fitri, A. (2020). *Manajemen Pengawasan Perbatasan di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Mitra.
- Nugroho, R., & Fitri, A. (2020). *Manajemen Pengawasan*

- Perbatasan di Era Digital.*
Jakarta: Pustaka Mitra.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perbatasan Negara.
- Setiawan, F., Wulandari, D., & Oktaviani, L. (2021). *Penerapan Teknologi Biometrik di Perbatasan.* Jurnal Teknologi dan Keamanan, 5(3), 177–190.
- Sihombing, B. (2020). *Dimensi Sosial Budaya dalam Pengawasan Imigrasi.* Jurnal Sosiologi Perbatasan, 8(1), 22–31.
- Supriyanto, Y. (2021). *Modernisasi Layanan Imigrasi di Wilayah Perbatasan.* Jurnal Imigrasi dan Integrasi, 4(2), 55–69.
- Syarif, M. (2020). *Evaluasi Sistem Pemeriksaan Keimigrasian Berbasis Digital.* Jurnal Hukum dan Keimigrasian, 7(1), 100–110.
- Teturan, Y.E., Yewen, J., & Latumahina, A. (2019). *Evaluasi Pengawasan Perbatasan di Wilayah Sota.* Jurnal Administrasi Perbatasan, 2(3), 140–152.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Wahyuni, S. (2021). *Tantangan Implementasi Face Recognition di PLBN.* Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan, 3(2), 132–143.
- Widiatmoko, R. (2021). *Reformasi Layanan Imigrasi dalam Perspektif E-Government.* Jurnal Birokrasi Digital, 9(2), 90–105.
- Widiatmoko, R. (2021). *Reformasi Layanan Imigrasi dalam Perspektif E-Government.* Jurnal Birokrasi Digital, 9(2), 90–105.